

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang dijelaskan dengan *Population*, Ukuran (*size*) daerah, Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah dan *Intergovernmental revenue* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahwa, *Population* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah didapathasil signifikan  $0,000 < 0,05$  dengan  $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau  $-1,667 < -7,840 < 1,667$  yang berarti *Population*berpengaruhnegatif dan signifikanterhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, semakin banyak populasi pada suatu kabupaten/kota akan membuat kinerja keuangannya menurun Hal ini dikarenakan jumlah penduduk sebuah daerah akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, Semakin banyak penduduk semakin banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah sehingga pemda harus bekerja lebih keras dan mengalokasikan belanja dengan baik agar dapat menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
2. Bahwa, Ukuran (*size*) daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah  $0,006 < 0,05$  dengan  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau  $2,824 > 1,667$  yang berarti Ukuran (*size*) daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, ukuran (*size*) daerah yang besar dalam pemerintah akan mempermudah dalam memberi kemudahan kegiatan

operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai.

3. Bahwa, Tingkat kemakmuran (*wealth*) daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah hasil didapat signifikan  $0,014 < 0,05$  dengan  $t$  hitung  $> t$  tabel atau  $2,525 > 1,667$  yang berarti Tingkat kemakmuran (*wealth*) daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro, pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersama-sama investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur suatu daerah.
4. Bahwa, *Intergovernmental revenue* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah didapat hasil signifikan  $0,781 < 0,05$  dengan  $-t$  tabel  $< t$  hitung  $< t$  tabel atau  $-1,667 < 0,279 < 1,667$  yang berarti *Intergovernmental revenue* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bahwa, *Population*, Ukuran (*size*) daerah, Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah dan *Intergovernmental revenues* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah hasil didapat signifikan  $0,000 < 0,05$  dengan  $F$  hitung  $> F$  tabel atau  $18,941 > 2,503$  yang berarti *Population*, Ukuran (*size*) daerah, Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah dan *Intergovernmental revenue* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan dapat menggali potensi PAD yang terdapat di masing-masing daerah mengingat terkait dengan PAD masih sangat kecil dibandingkan pendapatan secara keseluruhan.
2. Sebaiknya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan dapat merealisasikan belanja daerah dengan baik mengingat terkait dengan Pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota .
3. Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan dapat menggunakan dana perimbangan dari pusat dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan dan juga belanja daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel lain seperti Belanja daerah, Belanja modal dan temuan audit .
5. Penelitian ini menggunakan data LKPD hanya sampai tahun 2017 dan sampel penelitian 15 kabupaten/kota . Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel seluruh kabupaten/kota atau seluruh provinsi di Indonesia dengan menambahkan tahun pengamatan sebelumnya ,sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dari tahun ketahun.